

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi, Pendekatan, Metode Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di lokasi Demonstrasi yang tersebar di Jawa Barat yaitu

- a. Tanggal 14 Januari 2013 di PT. Samick Indonesia Cileungsi Bogor. Demonstrasi berlangsung kurang lebih satu bulan. Tuntutan Demonstran diantaranya: persamaan upah buruh, menarik kembali karyawan yang telah dipecat, dan minta dihapuskannya sistem *outsourcing*. Pengamanan demonstrasi dan mogok kerja di PT. Samick Indonesia telah diPam (Pengamanan) oleh anggota Polsek Cileungsi, Polsek Zona, Dalmas Polres Bogor, sebanyak 150 Orang, terdiri dari: Padal (Perwira Pengendali), Para Kanit (Kepala Unit), Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor), Kasat (Kepala Satuan), Samapta Polres Bogor, tetapi tidak melibatkan Brimob.
- b. Tanggal 23 -26 Juli 2013 bertempat di wilayah hukum Polres Karawang Jawa Barat. Demonstrasi terdiri dari karyawan (pekerja) perusahaan PT. Asahimas Karawang Jawa Barat menuntut kenaikan upah. Dengan alasan saat ini semua kebutuhan pokok sudah naik. Jumlah pengunjung rasa berdasarkan data kepolisian 500 orang pekerja. Keamanan BKO Polres Karawang dengan kekuatan dua subden/sub Detasemen (kompi) terdiri dari 2 SSS (165 Personil) anggota Detasemen B Pelopor Satbrimob Polda Jabar dipimpin oleh AKBP Dede Rojudin, S.IK. MH Kepala Detasemen B Pelopor Satbrimob Polda Jabar. Dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan: tujuh unit truk angkut pasukan, satu unit Bus dinas, satu unit Ford Renger, satu unit Vitara, satu unit Voridjer, alut dan alsus PHH, enam damkar, sembilan buah infinity, sembilan buah laras licin, sembilan buah Papper Ball, 16 buah HT.
- c. Tanggal 5 September 2013 didepan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, demonstrasi dilanjutkan di depan kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat. Demonstrasi terdiri dari karyawan perusahaan (pekerja) se Jawa Barat menuntut kenaikan upah. Dengan alasan sudah tidak sesuai antara gaji dengan kebutuhan dasar hidup yang terus naik. Jumlah pengunjung rasa berdasarkan

Atiek Rohmiyati, 2016

**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

data Kepolisian 1016 pekerja. Pengamanan demonstrasi melibatkan kekuatan personil sebagai berikut:

- 1) Dari Polrestabes Bandung: Pimpinan dan Padal (Perwira Pengendali), 116 Pers (Personil), Sat Intelkan 40 Pers, Sat Reskrim 30 Pers, Sat Narkoba 30 Pers, Sat Sabhara 150 Pers, Sat Binmas 10 Pers, Sat Lantas 30 Pers, 2 Regu Polwan 20 Pers, 2 SSK Dalmas Kerangka 270 Pers, Si Propam 20 Pers, Si Dokkes 4 Pers, Si Was 3 Pers, Humas 3 Pers, jadi jumlah personil 626 Pers.
  - 2) BKO Polda Jabar terdiri atas : 2 SSK Dalmas Polda Jabar 240 Pers, 1 SSK Brimob Polda Jabar 120 Pers, 1 SST Lantas Polda Jabar 40 Pers, jumlah personil BKO Polda Jabar 390 Pers
- d. Tanggal 26 September 2013 demonstrasi pekerja ke-2 di didepan gedung pemerintahan propinsi Jawa Barat (Gedung Sate) menunggu jawaban pemerintah dari hasil tuntutan demonstrasi yang dilakukan Tanggal 5 September 2013.

## 2. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa kriteria dalam penetapan subyek penelitian, terdiri dari: Latar (*setting*), para pelaku (*actors*), peristiwa-peristiwa (*events*), dan proses (*process*) (Miles dan Huberman: 2009, hlm. 56). Subyek penelitian kriteria latar (*setting*) adalah pengambilan informasi data melalui *field research* turun ke lapangan. Proses pengumpulan data didasarkan pada situasi dan kondisi tempat, yaitu demonstrasi pada Tanggal 14 Januari 2013 di PT. Samick Cileungsi Bogor, pada Tanggal 23-16 Juli 2013 demonstrasi di PT Ashahimas Kerawang, pada Tanggal 5 September 2013 demonstrasi ke-1 di di depan gedung PTUN Jawa Barat dilanjutkan demonstrasi kedepan gedung pemerintahan propinsi Jawa Barat (Gedung Sate), dan pada Tanggal 26 September 2013 demonstrasi pekerja ke-2 di didepan gedung pemerintahan propinsi Jawa Barat (Gedung Sate) menunggu jawaban pemerintah dari hasil tuntutan demonstrasi yang dilakukan Tanggal 5 September 2013. Kriteria pelaku (*actors*) adalah Brimob (Polda Jabar) dan pekerja (Buruh) dari komunitas pekerja se Jawa Barat. Kriteria peristiwa (*even*) adalah keluarnya surat keputusan Presiden tentang penundaan kenaikan gaji para pekerja. Kriteria proses (*process*) penelitian melalui wawancara langsung maupun wawancara tidak langsung berbentuk wawancara

Atiek Rohmiyati, 2016

**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tertulis, maupun tidak tertulis mengenai pendapat dan pandangan terhadap rumusan masalah penelitian dari judul Peran Brimob dalam Penanganan Demonstrasi secara Profesional Sebagai Wujud Penegakan Hukum.

## B. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan lima langkah.

**Pertama**, memilih topik kajian (Menentukan topik dengan mengkaji paradigma dan fenomena empirik, menetapkan fokus inquiri). **Kedua**, Instrumentasi (menentukan teknik pengumpulan data, memilih informan dari tiap unit analisis, menyiapkan instrumen pedoman observasi, wawancara, studi dokumentasi, menentukan kategori). **Ketiga**, Pelaksanaan penelitian, (mengurus perizinan, observasi, wawancara, studi dokumentasi dan dilakukan dengan triangulasi data, mempersiapkan catatan lapangan). **Keempat**, Pengolahan data, *open coding* (pengkodean terbuka), *axial coding* (Pengkodean berporos), *selective coding* (Pengkodean selektif). **Kelima**, Hasil penelitian, (Kesimpulan, implikasi, rekomendasi) (Satori dan Komariah, 2012, hlm. 82).

Berdasarkan langkah-langkah tersebut diatas. **Pertama**, penulis menentukan topik karena melihat seringnya terjadi aksi demonstrasi yang berujung konflik antara Brimob dan Demontran, kemudian penulis menetapkan topik Peran Brimob dalam Penanganan Demonstrasi secara Profesional sebagai Wujud Penegakan Hukum. Peneliti mengungkap fenomena empirik dengan menetapkan fokus pada Peran Brimob dalam Penanganan Demonstrasi sebagai fokus inquiri, dan penulis menentukan kategori pengembangannya sesuai pemahaman teoritik/konseptual.

**Tabel 3.1. kategori dan Sub Kategori**

Topik	Fokus	Kategori	Sub Kategori
Peran Brimob Dalam Penanganan Demonstrasi secara Profesional sebagai Wujud Penegakan	Bagaimana Peran Brimob secara Profesional melaksanakan Penanganan Demonstrasi dalam rangka menciptakan	Peran Brimob	Jenis Demonstrasi
			Penanganan Demonstrasi
			Psikologi Massa Demonstrasi
			Penyelesain Konflik
		Kendala Penanganan Demonstrasi	Profesionalisme Brimob
			Pembinaan Kemampuan Penanganan demonstrasi

Hukum	keamanan dan ketertiban		Kekuatan Anggota dan Sarana Demonstrasi
		Konstruksi Penanganan Demonstrasi secara profesional sebagai wujud penegakan hukum	Dasar Hukum Prosedur Pelaksanaan Demonstrasi
			Dasar Penanganan Demonstrasi
			Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Demonstrasi
		Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Peran Brimob dalam Penanganan Demonstrasi secara Profesional	Konsep Penanganan Demonstrasi ditinjau dari segi Filosofis, Yuridis, dan Sosial
			Konsep Brimob dalam PKN Terhadap Penanganan Demonstrasi
Penegakan Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan			

**Kedua**, Instrumentasi (menentukan teknik pengumpulan data, memilih informan dari tiap unit analisis, menyiapkan instrumen pedoman observasi, wawancara, studi dokumentasi). Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan informan ditentukan berdasarkan pada pengalaman latar penelitian yang memiliki pandangan tentang peristiwa penanganan demonstrasi

**Tabel 3.2. Instrumen Penelitian**

Observasi	Wawancara	Dokumentasi	Partisipasi
<i>Field Research</i> , peneliti terlibat langsung dilapangan	Langsung	Foto kegiatan demonstrasi	Terlibat langsung di lapangan dalam proses demonstrasi
Pemanfaatan kamera dan catatan	Tidak langsung atau tertulis	Artikel Brimob	
		Buku Postur Brimob	
		Arsip administrasi demonstrasi	
		Majalah Brimob	
		Foto kegiatan	

		penanganan demonstrasi	
--	--	------------------------	--

**Ketiga**, Pelaksanaan penelitian, diawali pengajuan ijin penelitian dari kampus UPI sebagai pengantar ijin penelitian ke instansi Kepolisian, diantaranya: Ke Mabes, Polda Jabar, Polrestabes, Sat Brimob Polda Jabar dan Perusahaan, untuk melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, serta mempersiapkan catatan lapangan.

**Tabel 3.3. Status Informan dan Kode Subyek Informan**

No	Status Informan	Subyek Terfokus	Kode Subyek
1	Perwira Tinggi	A	STA
2	Perwira Menengah	B	STB
3	Perwira Pertama	C	STC
4	Bintara	D	STD
5	Demonstran	E	STE
6	Masyarakat Umum	F	STF

**Tabel 3.4. Informan dari Anggota Kepolisian dan Brimob**

o.	Nama Inisial	Pangkat	Jabatan	Kesatuan
1	M. R. M	Irjen	Staf. Ahli Kapolri	Mabes
2	B.A	-	DPR RI/Mantan penasehat ahli Kapolri	DPR RI
3.	D. P	Brigjen	KARO-PID DIVHUMAS Polri	Mabes
4	T.R	AKBP	KaSubdit Dalmas Direktorat Sabhara	Polda Jabar
5	A. T. H	AKBP	Wakasab Brimob Polda Jabar	Brimob Polda Jabar
6	Rus	AKBP	Kabag Wasidik Dit Reskrimum Polda Jabar	Polda Jabar

7.	A.M. N	Kompol	Direktorat Sabhara	Polda Jabar
8.	M.D	Kompol	Wakaden Gegana	Satbrimob Polda Jabar
9.	Sdy	Kompol	Waka Detasemen A	Satbrimob Polda Jabar
10.	M. M	Kompol	Kasi Intel Brimob	Satbrimob Polda Jabar
11.	Dar	AKP	Kasubbag Renmin Polda Jabar	Polda Jabar
12.	Parn	AKP	Kasi Sarpas Brimob Polda Jabar	Satbrimob Polda Jabar
13.	Tj	IPTU	Kasimin Pers Brimob	Satbrimob Polda Jabar
14.	Bad	AIPDA	OPS Detasemen Pelopor SatBrimob Jabar.	Satbrimob Polda Jabar
15.	AD	Brigadir	Provost Detasemen Pelopor SatBrimob Jabar.	Satbrimob Polda Jabar
16.	Spn	Bripka	Seksi Operasional	Satbrimob Polda Jabar
17.	IS	Bripka	Intelpam Polsek Cileungsi Bogor	Polsek Cileungsi Bogor
18.	DW	Bripda	Samapta Polda Jabar	Polda Jabar
19.	H	Bripda	Samapta Polda Jabar	Polda Jabar

**Tabel 3.5. Informan Karyawan Perusahaan**

No.	Nama Inisial	Jenis kelamin	Usia	Nama Perusahaan
1.	A. F	Perempuan	24Th	PT. Sumi Indowiring system
2.	Ikh.	Laki-laki	27Th	PT Besco Karawang
3.	Ano.	Laki-laki	20Th	Bagian oprator di Purwakarta
4.	Dadan	Laki-laki	21Th	Bagian oprator di Purwakarta

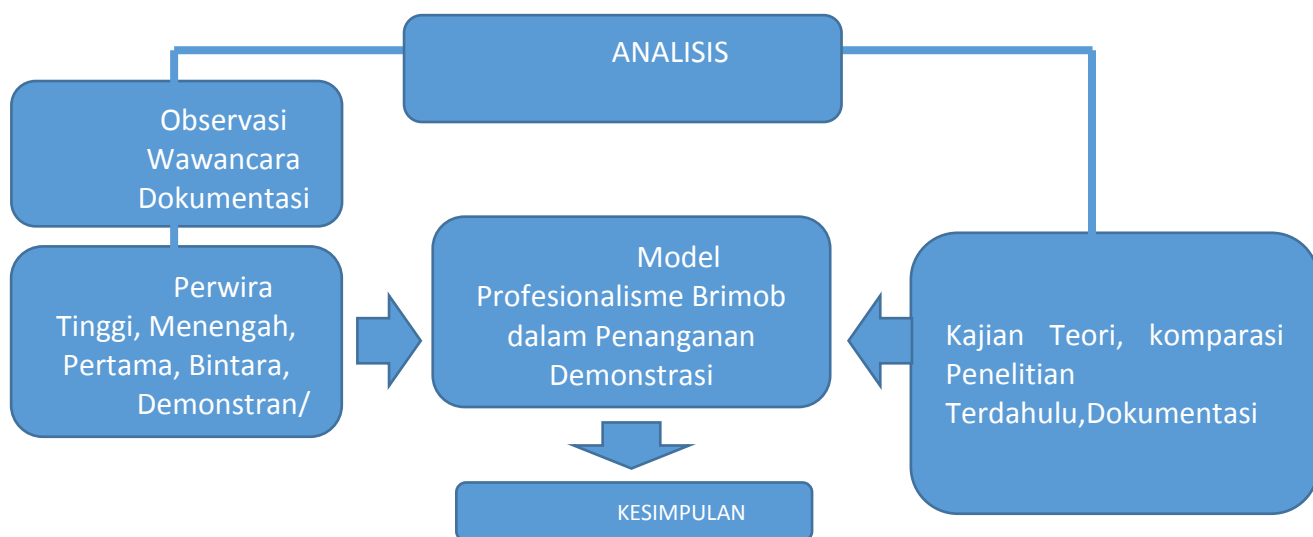
Atiek Rohmiyati, 2016

**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5.	E.Y.A	Perempuan	23Th	PT. YutuLeport Jaya Bekasi
6.	K.K	Laki-laki	25 th	Ketua SPN
7.	AD	Laki-laki	26 th	PT. Samick Bogor

**Keempat**, melakukan pengolahan data, kemudian data dianalisis menggunakan *analysis open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. (Strauss Corbin, 1998, hlm.61). **Kelima**, Hasil penelitian, dengan mendeskripsikan secara terstruktur temuan-temuan dengan *literacy* tinggi (dicerna, dipahami dan dikonstruksi), deskripsi hasil penelitian menjawab pertanyaan sesuai data yang diperoleh di lapangan. Kesimpulan merangkum pokok-pokok yang menarik, karena hal-hal yang sudah muncul secara eksploratif pada bagian isi (Satori dan Komariah, 2012, hlm 99). Implikasi dari temuan yang diperoleh kemudian direkomendasi oleh pihak-pihak yang berpengaruh terkait dengan hasil penelitian tersebut.



Bagan 3.1. Desain Penelitian

## C. Pendekatan dan Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara *Field Research* “peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan

alamiah atau in situ” (Moleong.L, 2012, hlm. 26). Melalui pengamatan, mendengarkan, mengumpulkan, memahami dan menganalisis data, dapat memperjelas multi perspektif dari berbagai masukan dari segenap partisipan yang terlibat di dalam penelitian, untuk mempermudah mengkonstruksi makna. Pendekatan kualitatif ini, agar lebih menekankan kepada kajian *interpretative*, secara khusus memberikan gambaran bagaimana Peran Brimob dalam Penanganan Demonstrasi secara Profesional sebagai Wujud Penegakan Hukum. Peneliti berusaha memperoleh kebenaran sempurna, maka gejala dari suatu penelitian bersifat holistik, dan terintegrasi baik tempat, subyek, dan kegiatan saling mendukung.

Peneliti sebelum melaksanakan penelitian membuat suatu rencana penelitian yang akan dilakukan dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, menentukan lapangan penelitian, membuat jadwal dan instrumen pertanyaan penelitian, rancangan pengumpulan data, dan pengecekan kebenaran data.

Prosedur pengumpulan data dilapangan menggunakan metode triangulasi sumber data, melalui beberapa narasumber dari: Mantan Kakorb Brimob (Staf Ahli Kapolri), penasehat ahli Kapolri, KARO-PID DIVHUMAS Polri, anggota Kepolisian Polda Jabar, anggota Kepolisian Polrestabes, anggota Kepolisian Polsek Cileungsi Bogor, anggota Brimob Sat Brimob Polda Jabar, anggota Brimob Detasemen A Polda Jabar, anggota Detasemen Gegana, para pekerja perusahaan, perekrut tenaga kerja, dan pemerintah.

## 2. Metode Penelitian

*"If someone wanted to know whether one drug is more effective than another, then a double blind clinical trial would be more appropriate than grounded theory study. However, if someone wanted to know what it was like to be a participant in a drug study [...], then he or she might sensibly engage in a grounded theory project or some other type of qualitative study."* (Strauss and Corbin, 1998, hlm. 40).

Kutipan diatas menunjukkan esensi dari kapan seseorang bisa menggunakan metodologi *Grounded Theory* untuk sebuah penelitian. *Grounded Theory* berguna untuk mempelajari persepsi dan perasaan individu terkait suatu bidang, sehingga

Atiek Rohmiyati, 2016

**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



sangat efektif jika sasaran penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mempelajari persepsi individu.

*Grounded theory* berorientasi pada perilaku atau tindakan berupa interaksi, antara peran Brimob dalam penanganan demonstrasi dengan para Demonstran, dan pemerintah, serta instansi terkait. *Grounded theory* tidak untuk menguji suatu teori, karena akan menghambat proses pengembangan rumusan teori baru itu sendiri. Apabila dalam penelitian menemukan teori yang memiliki hubungan dengan teori yang sudah ada sebelumnya, maka temuan baru tersebut dapat menjadi bahan untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Jika teori yang ditemukan identik dengan teori yang sudah ada, maka teori yang ada dapat dijadikan sebagai pengabsahan dari temuan baru itu.

Dasar penelitian ini menggunakan metode *Grounded Theory* melalui tiga bagian. **Pertama**, Mengungkap makna dari fenomena atau perilaku yang diteliti di lapangan (*life history*) sebagai data dasar (fakta), berupa penanganan demonstrasi secara profesional. Kajian ini diharapkan dapat mengungkap kausalitas sebagai kendala dalam penanganan demonstrasi. **Kedua**, lebih bersifat *fleksibel* dalam menjelaskan perasaan masing-masing partisipan. **Ketiga**, sebagai paradigma keilmuan untuk mengkonstruksi teori berdasarkan data empirik sesuai permasalahan. Peran Brimob dalam Penanganan demonstrasi secara Professional sebagai Wujud Penegakan Hukum.

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a) melalui kunjungan ke lapangan di Cileungsi Bogor, Karawang dan Bandung b) mempelajari, menanggapi suatu fenomena bagaimana Peran Brimob bertindak menangani demonstrasi secara profesional sebagai wujud pelaksanaan penegakan hukum belum dilaksanakan secara cepat, tepat dan tuntas, dan adanya reaksi anarkis sebagai fenomena yang diteliti, c) mengumpulkan data melalui observasi, wawancara secara lisan dan tertulis serta dokumentasi, kemudian pengkodean artinya semua fenomena diidentifikasi d) mengembangkan dengan melakukan hubungan antar kategori informasi, e) menulis proposisi teoritis atau menyajikan gambaran visual dari teori, f) peneliti melakukan analisis terhadap makna dalam

setiap paragraf, g) menyajikan data kemudian membuat interpretasi, untuk menemukan suatu temuan dilapangan

*Grounded theory* membuat spesifikasi terhadap: a) kondisi penyebab munculnya fenomena anarkis/konflik dan peran Brimob dalam penanganan demonstrasi menuju penyelesaian anarkis/ konflik dengan cepat, tepat dan tuntas, b) kendala profesionalisme Brimob dalam prosedur penanganan demonstrasi, c) membangun peran Brimob dalam penanganan demonstrasi secara profesional sebagai wujud penegakan hukum, d) perspektif PKN pada peran Brimob dalam penanganan demonstrasi

#### **D. Penjelasan Istilah**

Dalam penelitian ini dapat diberikan definisi konseptual sebagai berikut:

##### **1. Peran Brimob.**

Dalam pengertian etimologi peran memiliki makna menempatkan dirinya sebagai subyek, berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaku membantu mengamankan para anggota kepolisian dan masyarakat yang mendapat ancaman. Brimob berawal dari singkatan Brigade mobile sebagai nama suatu pasukan istimewa yang memiliki kemampuan tinggi dan sebagai pasukan reaksi cepat, “sekarang menjadi nama salah satu unit Polri” (2015, Murkal. R. M)

Peran Brimob Polri berkaitan dengan tugas kepolisian adalah membantu, memperkuat, fungsi teknis kepolisian lainnya atau dalam rangka melindungi anggota kepolisian dan masyarakat yang sedang mendapat ancaman, dalam pelaksanaan tugas operasi dan menggantikan tugas kepolisian pada satuan kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada tingkat kejahatan yang berkadar tinggi dan melengkapi operasi kepolisian yang dilaksanakan bersama-sama dengan fungsi kepolisian lainnya, melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan yang terorganisir senjata api, bom, kimia, biologi dan radio aktif guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Brimob Polri dalam melaksanakan tugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan peran yang sangat penting maka Brimob berupaya dengan melakukan

Atiek Rohmiyati, 2016

**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berbagai cara membangun hubungan dengan antar institusi dan membangun hubungan dengan masyarakat.

Dalam melaksanakan perannya, Brimob Polri perlu membangun kepercayaan masyarakat dan kerjasama dengan berbagai kalangan, baik internal Polri maupun dengan aparat pemerintah lainnya, seperti Pemerintah daerah, Satpol PP dan TNI secara komprehensif dan terintegrasi, menciptakan keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pelaku pelaksana keamanan dan ketertiban bersama-sama dengan fungsi kepolisian lainnya. Dalam majalah Media Informasi menurut Sutanto (Wahyunadi A.,2011, hlm. 24), “bahwa Korps Brimob Polri harus tetap solid karena sebagai satuan pemukul atau satuan pamungkas Polri, Brimob sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugas ikut melakukan pembenahan diri melalui peningkatan dalam berbagai pembinaan seperti pembinaan mental spiritual, pembinaan peningkatan kemampuan dan pembinaan pengetahuan”.

## **2. Penanganan Demonstrasi**

### **a. Penanganan**

Penanganan berasal dari kata dasar tangan, menurut kamus bahasa Indonesia Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1996: 1004), penanganan memiliki arti proses, cara, perbuatan menangani. Penanganan demonstrasi, berarti proses atau cara menangani demonstrasi, sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Undang Undang RI No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Praktik penanganan massa yang efektif, meningkatkan interaksi positif, mengurangi ketegangan massa, dibutuhkan pemahaman yang akurat terhadap perilaku massa, pemahaman terhadap dinamika sosial, dan karakteristik lingkungan yang bisa mempengaruhi motivasi individu pada situasi dan kondisi yang kondusif, maka diperlukan *crowd management* merupakan manajemen menangani demonstrasi.

Menurut Yitay (2013), *crowd management refers to a police department's preplanned, practised , and rehearsed response to a small or large disturbance*

Atiek Rohmiyati, 2016

**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*within a specific jurisdiction*. Lebih lanjut Yitay menyatakan bahwa, *crowd management* mencakup: perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*organizing*), *staffing*, pengarahan (*directing*), dan evaluasi (*evaluating*).

### **b. Demonstrasi**

Sesuai Pasal 9 UU No. 9 Tahun 1998 tentang mengemukakan pendapat disampaikan dalam bentuk demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi secara terminologi, menurut Santoso (2005, hlm. 132) berarti protes keras dilakukan oleh banyak orang tentang ketidakadilan, penyelewengan. Demonstrasi erat kaitannya dengan kekuasaan, karena salah satu pihak yang berhubungan dalam demonstrasi adalah pihak penguasa (pemilik perusahaan, instansi pemerintah dan sebagainya). Demonstrasi sebagai sikap protes dengan alasan politik, sosial ataupun kebijakan yang tidak *representatif* terhadap kepentingan rakyat. Hal itu senada dengan Yitay (2013, hlm. 1) menyatakan bahwa *Civil riots usually generated by civil unrest that trace back due to socio-economic or political instability of a country*. Demonstrasi terjadi dipicu oleh ketidakpuasan publik karena ketidakstabilan sosial ekonomi atau politik di suatu negara. Sifatnya kolektif dan melibatkan aktivitas fisik tertentu seperti berjalan beramai-ramai (*marching*), bernyanyi, meneriakkan slogan-slogan.

Demonstrasi adalah suatu tindakan mempertontonkan, memperlihatkan, menampilkan kehendak rakyat berupa aspirasi dengan cara berorasi, berbentuk tulisan ataupun kegiatan-kegiatan yang menimbulkan perhatian agar mendapat respon dari pihak pembuat kebijakan“. Apabila kegiatan tersebut tidak mendapat respon dari pihak terkait maka Demonstrasi bisa melakukan perbuatan yang anarkis, akibatnya demonstrasi bisa berubah menjadi huru-hara yang sulit dikendalikan cenderung meningkatkan ketegangan hubungan polisi dengan pers. (Berkley,2006, hlm. 184)

### **c. Profesional**

Kata profesional, menurut Farida (2004, hlm.301), berarti ahli. Sedang dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Hornby, AS (1995, hlm.924) *Professional is relating to or belonging to a profession* atau *having or showing the skill or qualities of a professional person*. Jadi kata profesional merupakan

Atiek Rohmiyati, 2016

**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keahlian yang berhubungan dengan pekerjaan atau pekerjaan yang dimiliki merupakan keahlian dan ketrampilannya diperoleh dari pendidikan, pelatihan khusus atau otodidak. Pengertian profesional itu sendiri berarti orang yang melakukan pekerjaan sudah paham baik secara konseptual, secara teknik atau praktik.

Ditinjau secara etimologi, istilah profesionalisme dalam buku panduan tentang HAM untuk anggota Polri (2006, hlm. 27), menjelaskan bahwa: “*Professionalisme* merupakan kemahiran dan kemampuan tinggi yang didukung oleh pengetahuan, sikap, ketrampilan dan kematangan emosional dalam melaksanakan tugas dibidang masing-masing, selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan hasil kerja maksimal sesuai dengan standar (Internasional) pekerjaannya”.

Profesional dalam penanganan demonstrasi menghasilkan suatu pekerjaan yang cepat, tepat dan tidak berlarut-larut, serta tidak menimbulkan efek negatif (kerugian atau hilangnya hak-hak orang lain), ketika mencari solusi dan pengambilan keputusan.

Untuk meningkatkan kualitas keahlian atau profesional Brimob Polri dalam penanganan demonstrasi, Brimob Polri terus melakukan latihan dengan tetap mem-*back up* fungsi teknis kepolisian lainnya dengan tujuan melindungi, menghalangi, membatasi gangguan kejahatan melawan hukum atau anarkis yang merugikan masyarakat.

#### **d. Penegakan Hukum**

Penegakan berarti “proses, perbuatan, cara menegakkan”. Penegakan hukum berarti keadaan yang sigap dalam menangani pelanggaran hukum. Penanganan demonstrasi secara profesional berdasarkan pada peraturan dan perundangan, sebagai wujud penegakan hukum telah dilakukan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hal ini membuktikan Indonesia sebagai negara yang menjalankan *rule of law*, kedisiplinan bisa terjadi karena adanya sifat hukum berupa pemaksaan, seperti dikemukakan Bayley (1998, hlm. 210) bahwa: “pencegahan kejahatan yang tegas membawa ke pandangan fungsi polisi yang maksimal dengan penegakan hukum secara efisien”, artinya tindakan tegas, terukur akan

Atiek Rohmiyati, 2016

**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menciptakan kondisi yang aman dan tertib. Oleh karena itu pencegahan kejahatan dalam aksi demonstrasi sebagai usaha pencegahan massa sangat perlu difokuskan, untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap keamanan bagi masyarakat, dan jalannya roda pemerintahan, meskipun polisi memiliki kekuatan hukum untuk mengatur demonstrasi, penggunaan kekuatan harus mengacu pada Undang-Undang hak asasi manusia yang mengharuskan semua otorita publik, termasuk polisi. Apabila terdapat pelanggaran hukum, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi. Perkap sebagai dasar dilaksanakannya SOP merupakan hukum yang harus dijalankan, apabila tidak pasti akan mendapatkan sanksi. Perundangan-undangan tersebut diatas sebagai alat yang mengatur kegiatan demonstrasi untuk menjamin kepastian dan jaminan hukum.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini kedudukan peneliti adalah sebagai instrumen utama. Menurut Moleong (2012, hlm.9) bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data, maka pendapat ini dijadikan pedoman pengumpulan data yaitu instrumen utama dibantu dengan instrumen berbentuk pertanyaan-pertanyaan.

##### **1. Instrumen Pertanyaan sebagai Bentuk Wawancara Tertulis yang Berkaitan dengan Penelitian**

a) Instrumen pertanyaan tentang implementasi peran Brimob dalam Penanganan Demonstrasi menuju penyelesaian konflik, b) Instrumen pertanyaan tentang aktualisasi profesionalisme Brimob dalam menghadapi kendala pada pelaksanaan penanganan demonstrasi, c) Instrumen pertanyaan tentang konstruksi interaksi antara peran Brimob dengan penanganan demonstrasi secara profesional sebagai wujud penegakan hukum, d) Instrumen pertanyaan Perspektif pendidikan kewarganegaraan terhadap peran Brimob dalam penanganan demonstrasi secara profesional

##### **2. Perbedaan Instrumen Pertanyaan terhadap Partisipatoris**

Bentuk kalimat pertanyaan yang berbeda antara anggota kepolisian, anggota Brimob Pelopor Detasemen A, dan massa demonstrasi (pekerja). Instrumen soal

Atiek Rohmiyati, 2016

**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

untuk Perwira Pelopor Detasemen A Polda Jabar dengan soal No. 1 terdiri dari tujuh jumlah soal yaitu a s/d g, soal No. 2 terdiri dari tujuh jumlah soal yaitu a s/d g, No. 3 terdiri dari tujuh jumlah soal yaitu a s/d g, No. 4 terdiri dari empat jumlah soal a s/d d, No. 5 terdiri dari empat jumlah soal a s/d d.

Instrumen soal untuk anggota Brimob pelopor Detasemen A Polda Jabar dengan soal No. 1 terdiri dari empat jumlah soal a s/d d, No. 2. terdiri dari tujuh jumlah soal a s/d g, No. 3 terdiri dari enam jumlah soal a s/d f, No. 4 terdiri dari enam jumlah soal a s/d f, No. 5 terdiri dari tiga jumlah soal a s/d c.

Instrumen soal untuk karyawan/ Pekerja perusahaan dengan soal No. 1 terdiri dari lima jumlah soal a s/d e, No. 2. terdiri dari abjat tujuh jumlah soal a s/d g, No. 3 terdiri dari lima jumlah soal a s/d e, No. 4 terdiri dari delapan jumlah soal a s/d h, No. 5 terdiri dari empat jumlah soal a s/d d.

#### **F. Proses Pengembangan Instrumen**

Berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan *Grounded Theory* dan menguji keabsahan (*trustworthiness*) data hasil penelitian, pemeriksaannya melalui empat kriteria, yaitu: apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Moleong lexy, 2012, hlm. 324).

Pada tingkat Kepercayaan (*credibility*), bagaimana hasil penelitian bisa dipercaya oleh pembaca, maka tindakannya berupa pembuktian dari peneliti dengan cara memperpanjang masa penelitian. Penelitian ini dilakukan dari 14 Januari 2013 di perusahaan Samick Cileungsi Bogor, Tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 2013 bertempat di perusahaan PT. Asahimas Karawang. Tanggal 5 September 2013 di depan Pengadilan Tata Usaha Negara dan di depan gedung Pemerintahan Propinsi Jawa Barat Bandung I dan 26 September 2013 di depan gedung Pemerintahan Propinsi Jawa Barat Bandung II. Peneliti terjun ke lapangan dan berperan serta dalam demonstrasi sehingga mendapatkan data dengan metode triangulasi data dengan menggunakan teori cara pengamatan langsung, wawancara kepada pihak-pihak yang bisa memberikan informasi yang relevan yaitu pihak yang berkompeten diantaranya personil Brimob, personil Polri (Dalmas) atau para pekerja perusahaan yang sedang melakukan demonstrasi.

Keteralihan (*transferability*) dilakukan dengan cara, *mendeskripsikan* kegunaan dari temuan hasil penelitian ini secara rinci, utuh dan hasil penelitian ini sesuai dengan aspek permasalahan yang sama, bisa diaplikasikan pada lokasi dan situasi yang berbeda. Ketergantungan (*dependability*), jika beberapa kali dilakukan studi dengan kondisi yang sama dan hasilnya sama. Kepastian (*confirmability*), untuk mengetahui dapat-tidaknya dikonfirmasi persetujuan kepada sumber, atau beberapa orang terhadap pandangan dan pendapat temuan untuk mengetahui obyektifitas data sehingga hasil penelitian tersebut dipastikan dapat dipercaya.

Data hasil penelitian tingkat kepercayaan, keteralihan, dan ketergantungan, serta kepastian mendapat nilai tinggi, maka dapat dipergunakan dan diikuti oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Dibawah ini sebagai Pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi

Atiek Rohmiyati, 2016

**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



### **1. Pedoman Observasi**

- a. Pengumpulan data lapangan dengan berperan sebagai partisipan
- b. Pengumpulan data lapangan dengan berperan sebagai observer
- c. Pengumpulan data lapangan dengan lebih banyak berperan sebagai outsider (orang luar) terlebih dahulu, kemudian masuk kedalam setting penelitian sebagai insider (orang dalam)

### **2. Pedoman Wawancara**

- a. Melaksanakan wawancara tidak terstruktur dan terbuka, sambil mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan peran Brimob dalam penanganan demonstrasi menuju penyelesaian konflik, aktualisasi profesionalisme Brimob dalam menghadapi kendala penanganan demonstrasi, konstruksi interaksi antara peran Brimob, penanganan demonstrasi secara profesional sebagai wujud penegakan hukum, dan perspektif pendidikan kewarganegaraan terhadap peran Brimob dalam penanganan demonstrasi secara profesional
- b. Melaksanakan wawancara semi terstruktur, sambil merekam dengan audiotape, lalu mentranskrip
- c. Melaksanakan wawancara dengan cara menyampaikan soal pertanyaan berbentuk tertulis berkaitan dengan peran Brimob dalam penanganan demonstrasi, pelaksanaan penanganan demonstrasi secara profesional, konstruksi interaksi antara peran Brimob, penanganan demonstrasi secara profesional sebagai wujud penegakan hukum, dan efektifitas pendidikan demokrasi pada masyarakat dalam pelaksanaan penanganan demonstrasi.

### **3. Pedoman Dokumentasi**

- a. Mendokumentasikan buku harian selama penelitian yang berisi tentang kegiatan penelitian
- b. Menganalisis dokumen publik (seperti, memo resmi, catatan, atau arsip-arsip, buku-buku). Peneliti memperoleh berbagai data baik dari Polsek Cileungsi, Polda, Brimob Gegana, Detasen A Pelopor Polda Jawa Barat, perpustakaan PTIK di Jakarta dan perpustakaan SESPIM di Lembang Bandung
- c. Meminta foto partisipan dan berbagai foto demonstrasi pekerja di Jawa Barat

d. Dokumen publik: majalah, koran, makalah, buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Bentuk dokumentasi yang digunakan situs internet, video, foto, jurnal dan undang-undang, buku-buku tentang Kepolisian dan Brimob. Mengumpulkan dokumen (*Non human resources*) diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain dalam rangka pengembangan analisis kajian.

### G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan berbagai jenis sumber data dengan cara Triangulasi sumber data dengan alasan untuk menggali kebenaran informasi melalui teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, tentang peran Brimob dalam penanganan demonstrasi secara profesional sebagai wujud penegakan hukum. Dalam penelitian ini terdapat dua golongan sumber data. **Pertama**, sumber data primer yaitu data penelitian diperoleh dari sumber asli tanpa perantara, melalui wawancara tertulis maupun wawancara (*interview*) langsung bertatap muka dengan responden / *human resources* (mantan Kakorp Brimob, Penasehat ahli Kapolri, anggota kepolisian Polda Jabar, Brimob Polda Jabar, pekerja) dan data dari hasil observasi kelapangan (*participant observation*). **Kedua**, sumber data sekunder, data penelitian diperoleh melalui media perantara seperti buku teks sejarah Brimob, buku-buku tentang kepolisian, majalah teratai media informasi Korps Brimob, dokumen Brimob, situs internet, artikel, jurnal tentang Kepolisian dan Brimob, arsip, dan catatan resmi, catatan pribadi, foto.

Semua data tersebut diperoleh dengan waktu dan tempat yang berbeda, dan melakukan aktivitas sama akan memberikan pandangan (*insights*), sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi, untuk meminimalisir adanya bias saat terjadi analisis data.

Pengumpulan data berbentuk:

**a. Observasi**, peneliti turun langsung kelapangan ketika terjadi demonstrasi dengan ikut berperan serta dalam demonstrasi, mengamati peristiwa dari awal demonstrasi hingga terjadi orasi dan ikut berperan serta dalam ruangan mediasi dan diluar ruangan sampai selesainya demonstrasi. Data yang didapat melalui

Atiek Rohmiyati, 2016

**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

observasi antara lain, penyebab terjadinya demonstrasi, tahap-tahap peristiwa demonstrasi, perilaku massa demonstrasi, tindakan mediasi. Pengamanan demonstrasi oleh Polisi dalam pengendalian massa hingga terjadinya lintas ganti pengamanan demonstrasi oleh pasukan Brimob dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti serta mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut, dilakukan untuk mengamati dan mencatat kondisi obyek dengan melihat pelaksanaan kegiatan demonstrasi hingga berakhirnya demonstrasi.

**b. Wawancara,** peneliti melakukan wawancara *face to face* dengan partisipan, wawancara dibuat pedoman sebagai acuan dan instrumen wawancara bersifat terbuka sesuai pedoman wawancara baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk mereka atau mencatat informasi, (Creswell, 2010:266). Percakapan dan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung yang diarahkan untuk mencapai tujuan mendapatkan data berupa pengalaman, pendapat, perasaan maupun pengetahuannya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan langsung dari informan. Wawancara dilakukan untuk memperjelas hasil observasi serta mengetahui segala permasalahan yang tidak tertangkap oleh indera. Bentuk wawancara untuk melihat permasalahan dalam pengumpulan data adalah penggunaan wawancara terpusat, dimana responden membagi pengalaman yang berkaitan dengan penanganan demonstrasi sebagai dasar wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait yaitu, massa demonstrasi (pekerja), anggota Kepolisian, anggota Brimob dilakukan dengan wawancara lisan secara langsung ditempat demonstrasi dan di kantor markas besar (Mabes) Kepolisian, Kantor Polda (Polisi Daerah Jawa Barat), serta kantor Brimob (Korsp Brimob) Polda Jawa Barat, Polsek Cileungsi Bogor dan di perusahaan. Sedangkan wawancara Brimob dan pekerja yang berbentuk tulis dilaksanakan di dalam kantor Brimob dan di Perusahaan.

**c. Studi Dokumentasi,** Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi, berupa dokumen-dokumen kualitatif, angket, fenomenologi dan informasi faktual, peneliti memanfaatkan sumber-sumber

Atiek Rohmiyati, 2016

**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berupa dokumen publik: majalah, koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (seperti, buku harian, diary, surat, e-mail) dan audio visual (Creswell, 2010, hlm. 266-270), pengumpulan dokumen berbentuk foto tentang kegiatan Brimob dan foto tentang peristiwa demonstrasi, dokumen tentang denah pengamanan demonstrasi, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian berupa Undang-Undang yang berkaitan dengan penanganan demonstrasi, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dokumen Protap, panduan latihan penanganan demonstrasi, Postur Korbrimob Polri, dokumen anti anarkis, dokumentasi tentang berbagai peristiwa selama melaksanakan penelitian di lapangan

#### **H. Analisa Data**

Penelitian *Grounded Theory* menggunakan pemikiran deduktif dan didasarkan pada analisis data yang tidak mengandung hipotesis (*preconceived ideas*), sehingga memungkinkan penelitian yang lebih obyektif. Tidak adanya hipotesis awal mengharuskan dilakukannya wawancara dan analisis dokumen secara aktif sehingga mendorong peneliti untuk selalu membandingkan antara topik-topik yang muncul. Menurut Glaser (1992), Strauss dan Corbin (1990), dalam *Grounded Theory*, peneliti mengamati data tanpa adanya bias untuk mengamati topik-topik yang muncul, yang kemudian bisa dikategorikan untuk merumuskan hipotesis. Pengkodean data (*coding*) merupakan suatu proses yang sistematis.

Proses analisis dalam metode penelitian *Grounded Theory* dilakukan sebagai berikut:

1) **Open Coding**, merupakan pengkategorian informasi awal tentang fenomena yang diteliti dari data yang diperoleh. Hal ini merupakan suatu proses penguraian, pengamatan, pembandingan, konseptualisasi dan pengkategorian data seperti yang dijelaskan oleh Strauss dan Corbin, “*the process of breaking down, examining, comparing, conceptualizing, and categorizing data*” (Strauss & Corbin, 1998, hal. 61). Dalam penelitian ini, tahap awal dilakukan dengan pengkodean terbuka untuk menemukan sebanyak mungkin data sepanjang berkenaan dengan rumusan masalah. Data yang diperoleh dari wawancara dengan institusi Brimob dan pihak

Demonstran serta pakar kepolisian menjadi landasan mengenai konsep yang relevan secara teoritik dalam membatasi objek pengamatan. Data yang terkumpul langsung dianalisis dengan pengkodean terbuka, yaitu data disusun berdasarkan kategori awal yang mencerminkan variabel-variabel yang membangun model profesionalisme penanganan demonstrasi, dan menghasilkan *keywords* yang merupakan intisari dari hasil wawancara. Proses ini disebut pengkodean terbuka (*open coding*). Tahap pertama dilakukan dengan menseleksi kata-kata kunci (*keywords*) berdasarkan wawancara dengan sejumlah perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama dan bintara yang terlibat langsung ataupun yang tidak terlibat langsung pada penanganan demonstrasi serta wawancara kepada sejumlah Demonstran.

Berikut tabel daftar kata kunci sebagai rangkuman wawancara pada aplikasi pengkodean terbuka:

**Tabel 3.6 Wawancara dengan Anggota Brimob**

Berdasarkan Undang –Undang	Ahli
Tanggung Jawab	Proporsional
Transparan	Nesesitas
Komitmen	Memiliki kemampuan
Memiliki kewenangan	Tidak ada keragu-raguan
Legal	Sesuai Prosedur
Dilaksanakan seoptimal mungkin	Tidak berpamrih
Dilakukan atas dasar rasa tanggungjawab	Dilaksanakan berdasarkan program kerja
Menjaga kemampuan dengan berlatih secara Continue	Dikerjakan secara serius dengan penuh kehati-hatian
Adil	Menggunakan Perhitungan
Melindungi	Melayani
Mengayomi	Mengamankan
Perintah	Tidak jelas
Sarana tidak memadai	Tidak rasio antara jumlah anggota dan jumlah Demonstran

Minimnya biaya penanganan demonstrasi	Tidak memadainya akomodasi
---------------------------------------	----------------------------

**Tabel 3.7. Wawancara dengan Masyarakat/Demonstran**

Pekerjaan dilakukan dengan sesungguhnya	Sesuai Hukum yang berlaku
Menjaga	Mentertibkan
Mengamankan	Sesuai Prosedur
Memiliki kemampuan menanggulangi kejahatan	Mengamankan demonstrasi tidak diskriminasi
Tegas	Bersikap ramah
Arogan	Angker
Kasar	Melindungi
Semena-mena	Tidak akomodatif
Arogan	Komunikatif, melalui berbagai

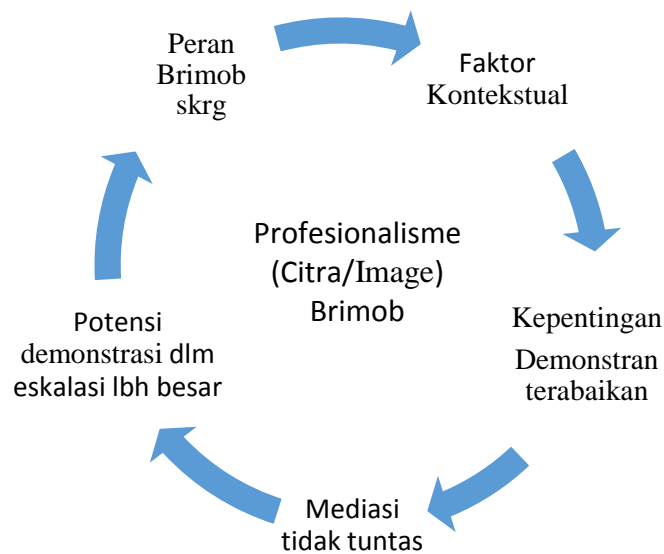
- 2) ***Axial Coding***, merupakan penggabungan data setelah dilakukannya open coding, untuk kemudian mengembangkan suatu paradigma pengkodean (*logic diagram*) yang, mengidentifikasi fenomena utama, mengeksplorasi kondisi penyebab, mengidentifikasi konteks, menunjukkan strategi dan menggambarkan konsekuensi. Setelah diperoleh kata kunci dari pihak kepolisian / Brimob dan Demonstran, maka dilakukanlah tahap selanjutnya, yaitu pengkodean aksial. Dalam pengkodean aksial, data dikelompokkan menjadi kategori dan sub-kategori. Pengelompokan data menjadi kategori tersebut bertujuan untuk mendapatkan model paradigma yang dapat menjelaskan dan memahami hubungan antar kategori untuk memahami fenomena yang terjadi. Pemahaman fenomena dapat dilakukan secara induktif maupun deduktif.
- 3) ***Selective Coding***, merupakan integrasi berbagai kategori yang diperoleh dalam axial coding. Hasil dari proses pengumpulan data dan analisis merupakan sebuah teori *substantive* yang relevan dengan permasalahan atau obyek yang

diteliti. Berdasarkan paradigma aksial koding, diketahui bahwa inti kategori pada penelitian ini adalah bagaimana melakukan penanganan demonstrasi untuk menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan ekses-ekses negatif yang mengarah pada munculnya demonstrasi-demonstrasi baru dalam skala yang lebih besar. Berdasarkan paradigma pengkodean aksial, tahapan kontinyu yang terdapat di dalamnya antara lain konteks, tindakan/interaksi, konsekuensi, kondisi pengaruh dan kondisi penyebab. Dalam penelitian ini, fenomena yang terjadi adalah Brimob berperan mengamankan dan mentertibkan demonstrasi, namun realita di lapangan terjadi konflik antara Brimob dan demonstran. Konteks penelitian ini ditujukan untuk mendalami faktor kontekstual yang mendasari profesionalisme Brimob, sesuai persepsi yang dimiliki Brimob dan Demonstran, yaitu keikhlasan, kepedulian, tanggung jawab dan ketuntasan.

Brimob yang profesional harus memperhatikan sebab-akibat dari tindakan yang dilakukan terhadap penggunanya, dalam hal ini, masyarakat dan Demonstran maupun masyarakat umum secara luas. Citra (*image*) Brimob sebagai penegak hukum dipertaruhkan karena terkadang, konflik antara Demonstran dengan pihak yang dituju berubah menjadi konflik antara polisi/Brimob dan Demonstran.

Hal ini dapat terjadi ketika aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi tidak mendapat perhatian, sehingga menimbulkan kekecewaan semakin besar memungkinkan terjadinya demonstrasi lanjutan dalam skala dan eskalasi yang lebih besar. Hal ini bukan saja berpotensi menimbulkan konflik antara polisi / Brimob dan Demonstran, tetapi juga memberikan kesan negatif di kalangan Demonstran bahwasanya demonstrasi hanya efektif jika dilakukan dengan kekerasan. Jika konflik ini tidak dikelola dengan baik, maka citra/image Brimob akan buruk di mata masyarakat. Untuk itu, penanganan demonstrasi harus mengikutsertakan langkah-langkah penyelesaian konflik hingga tuntas.

Gambaran paradigma pengkodean aksial pada penelitian ini divisualisasikan dalam gambar berikut:



**Gambar 3.1. Paradigma Pengkodean Aksial**

Pengkodean selektif merupakan tahapan terakhir pada pengolahan data menggunakan metode *Grounded theory* (GT) menuju pembentukan suatu teori. Pengkodean selektif berarti menyeleksi kategori inti dan menghubungkannya dengan keseluruhan kategori yang ada. Menurut Strauss dan Corbin, *selective coding* merupakan “*the process of selecting the core category, systematically relating it to other categories, validating those relationships, and filling in categories that need further refinement and development*” (Strauss & Corbin, 1998, hal. 116). Dengan demikian, proses yang terjadi dengan memilih satu kategori inti lalu dibentuk alur penyusunan cerita berdasarkan kategori yang muncul selama proses pengkodean terbuka lalu memvalidasi hubungan tersebut dan mengisi kategori dalam pengembangan lebih lanjut, ini berarti telah ditemukannya intisari penelitian dan menggabungkan seluruh teori yang muncul di dalamnya (Daymon dan Halloway, 2002, 189-193). Inti dari proses penggabungan ini adalah memunculkan spirit teoritis peneliti dari setiap kategori. Cahyadi (2009) mengungkapkan bahwa spirit teoritis tidak tampak secara eksplisit namun tertangkap oleh peneliti. Perlu diperhatikan bahwa proses *Grounded Theory* berdasarkan Strauss dan Corbin (1998) dalam Titscher (2009) didasari pada penjelasan runut dan pengolahan data dengan coding dapat berubah dari waktu ke waktu. Masalah penelitian dalam *Grounded Theory* ini masih bersifat umum, maka menyederhanakannya perlu dilakukan proses penggabungan dan

Atiek Rohmiyati, 2016

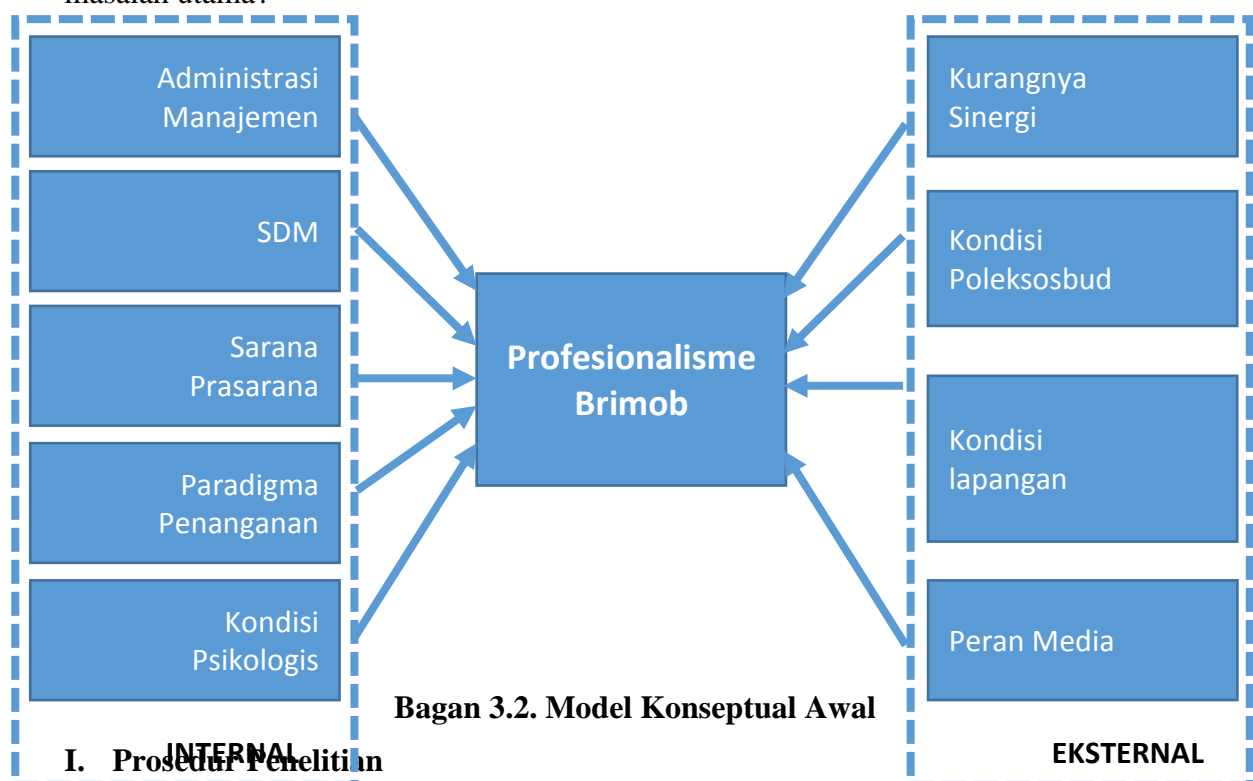
**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



atau seleksi secara sistematis. Tema utama nantinya akan menjadi dasar untuk merumuskan masalah utama dan hipotesis penelitian. Lalu dibandingkan lagi ke kondisi nyata untuk mengabsahkan teori yang terbentuk. Dalam membentuk suatu konsep yang menghubungkan kategori-kategori dapat dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan: “Apa yang sedang dikaji?, Apa yang ditemukan?, Kesimpulan apa yang dapat ditarik?”. Dari konsep-konsep yang disusun dengan menggunakan dasar pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dihasilkan *Grounded theory*.

Selanjutnya dalam mengintegrasikan kategori-kategori ke dalam kategori inti dilakukan konseptualisasi dengan analisis pertanyaan: “Apa yang menonjol dari hasil kajian atau penelitian ini? “Mana yang oleh peneliti dianggap menjadi masalah utama?



Penelitian ini dilakukan melalui prosedur ilmiah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan persetujuan desain penelitian kepada pihak program studi dan para pembimbing yang ditunjuk.
2. Melaksanakan seminar usulan penelitian yang dihadiri oleh pimpinan SPS.
3. Pengurusan ijin penelitian
4. Perumusan dan penyempurnaan kisi-kisidan instrumen penelitian

Atiek Rohmiyati, 2016

**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI SECARA PROFESIONAL SEBAGAI WUJUD PENEGAKAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5. Melakukan observasi ke lokasi penelitian
6. Pengumpulan data lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner kepada seluruh responden
7. Penyusunan laporan secara keseluruhan dalam suatu bentuk dokumen karya ilmiah
8. Melakukan konsultasi dengan para pembimbing untuk menyelesaikan naskah hasil penelitian
9. Penggandaan laporan
10. Publikasi hasil penelitian melalui seminar dan jurnal ilmiah.